BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Partisipasi Masyarakat

Menurut Jennifer-Mc Cracken-Deepa (1998:126) menjelaskan bahwa Partisipasi merupakan proses dimana pihak-pihak yang terlibat mempengaruhi dan mengendalikan inisiatif pembangunan, keputusan dan sumber-sumber yang mempengaruhi mereka. Partisipasi memiliki sisi yang berbeda, bermula dari pemberian informasi dan metode konsultasi sampai dengan mekanisme untuk berkolaborasi dan pemberdayaan yang memberi peluang bagi stakeholder untuk lebih memiliki pengaruh dan kendali.

Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif-motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati seseorang.

Pengertian partisipasi menurut Sutarto (1980:125) adalah turut sertanya seseorang baik secara langsung maupun emosional untuk memberikan sumbangan-sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi seseorang yang bersangkutan melaksanakan akan tanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut.

Pengertian di atas menekankan pada keikutsertaan seseorang dalam proses pengambilan keputusan. Bentuk partisipasi yang merupakan keikut sertaan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan setidaknya terdapat dua tipe partisipasi Koentjaraningrat (1980: 79) menyatakan bahwa:

1. Partisipasi dalam aktivitas bersama dalam proyek-proyek pembangunan.
2. Partisipasi sebagai individu di luar aktivitas bersama dalam pembangunan.

Bentuk partisipasi lain yang lebih lengkap dikemukakan oleh Bryan dan White dalam Ndraha (1983:17) dimana disamping ada partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan juga terdapat partisipasi untuk pemanfaatan suatu proyek.

Selain pendapat tersebut diatas, Simanjuntak (1982:56) mengemukakan pendapat bahwa dalam menggerakkan partisipasi masyarakat perlu adanya

klasifikasi dari partisipasi tersebut. Selanjutnya dikatakan Bryan dan White dalam Ndraha (1983: 23) bahwa partisipasi dapat berbentuk:

a. Partisipasi buah pikiran.
b. Partisipasi harta dan uang.
c. Partisipasi tenaga atau gotong-royong.
d. Partisipasi sosial.
e. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan nyata yang konsisten.

Berbicara masalah partisipasi, berarti akan selalu berkait dengan upaya-upaya keikutsertaan seluruh komponen masyarakat secara aktif dalam berbagai aktivitas yang telah direncanakan. Keikutsertaan secara aktif tersebut merupakan energi yang mendorong bergeraknya roda pembangunan atau kegiatan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan atau untuk memecahkan suatu masalah.

Partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan aktif warga masyarakat, baik secara perorangan, kelompok atau kesatuan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan bersama, perencanaan dan pelaksanaan program dan pembangunan masyarakat, yang dilaksanakan di dalam maupun diluar lingkungan masyarakat atas dasar rasa kesadaran dan tanggungjawab, demikian antara lain yang dijelaskan Soelaiman (1985:6). Secara konseptual partisipasi masyarakat merupakan alat dan tujuan pembangunan masyarakat, dengan demikian ia berfungsi sebagai penggerak dan pengarah proses perubahan sosial.

Pendapat lainnya tentang partisipasi masyarakat, dikemukakan oleh Cary dalam Iskandar (1994: 75) bahwa tekanan utama partisipasi warga masyarakat adalah pada kebersamaan atau saling memberikan sumbangan akan kepentingan dan masalah-masalah bersama, yang tumbuh dari kepentingan dan perhatian individu warga masyarakat itu sendiri. Partisipasi tidak lain adalah hasil dari konsensus sosial warga masyarakat akan arah perubahan sosial yang mereka harapkan.

Dengan demikian partisipasi masyarakat tidak lain merupakan peningkatan mutu dari gotong-royong tradisional yang berdasarkan spontanitas, kesuka-relaan dan bersifat insidental, kepada suatu usaha perencanaan yang memerlukan perumusan tujuan, penentuan langkah-langkah dan cara kerja untuk mencapai tujuan. Proses ini jelas memerlukan pemikiran dan keputusan yang rasional.

Pimpinan dan orang-orang yang dipimpinya harus pula peka atau tanggap terhadap aspirasi kebutuhan dan pikiran-pikiran yang hidup dimasyarakat, sehingga perumusan rasional tadi pada hakekatnya merupakan penjabaran dari apa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Stuart Chapin, Faisal K. dan Joseph F. Stepanek dalam Iskandar (1994:79) mencatat ada lima aspek yang terkait dengan tipe-tipe partisipasi masyarakat, yaitu dari penilaian masyarakat tentangan yang rendah hingga ke penilaian masyarakat tentangan yang tertinggi, ya itu sebagai berikut:

- Keanggotaan seseorang dalam organisasi atau kelompok kegiatan masyarakat.
- Intensitas kehadiran seseorang dalam berbagai pertemuan masyarakat.
- Intensitas seseorang dalam memberikan sumbangan dana atau keuangan bagi kepentingan bersama.
- Keanggotaan seseorang dalam berbagai kepanitiaan yang dibentuk dalam masyarakat.
- Posisi kepemimpinan seseorang dalam berbagai organisasi/ kelompok kegiatan.

Berdasarkan pendapat tersebut, nampaknya partisipasi lebih dititikbe ratkan kepada aktivitas seseorang dalam suatu organisasi sebagai pencerminan daripada partisipasi. Sedangkan menurut Rozen Berg dalam Tjokrowinoto (1984: 24), partisipasi merupakan ”keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyumbangkan pikirannya bagi tercapainya tujuan organisasi dan bersama-sama bertanggungjawab terhadap organisasi tersebut”.

Partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat dinyatakan dalam bentuk pemikiran, keterampilan/keahlian, tenaga, harta benda atau uang (Keith Davis dalam Santoso, (1988:16). Sejalan dengan itu, Surbakti (1984:72-73) mengemukakan bahwa kegiatan yang dapat digolongkan sebaga i partisipasi antara lain: (1) Ikut mengajukan usul-usul mengenai suatu kegiatan; (2) Ikut serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan tentang alternative program yang dianggap paling baik; (3) Ikut serta melaksanakan apa yang telah diputuskan

termasuk disini memberi iuran atau sumbangan materil; (4) Ikut serta mengawasi pelaksanaan keputusan.

Dengan demikian, ukuran peran serta masyarakat lebih tepat bila dijelaskan secara kualitatif. Dalam hal ini partisipasi dapat didefinisikan ke dalam sebuah tipologi yang memperlihatkan adanya perbedaan penilaian masyarakat tentang intensitas keterlibatan masyarakat (Whyte dalam Bourne, 1984:222). Partisipasi masyarakatdalam pengambilan keputusan dan penyerahan tanggung jawab dapat dibedakan menjadi (Hamdee dan Goethert, 1997: 66):

1. Tidak ada sama sekali : outsider semata-mata bertanggung jawab pada semua pihak, dengan tanpa keterlibatan masyarakat.
2. Tidak langsung : sama dengan tidak ada partisipasi tetapi informasi merupakan sesuatu yang spesifik.
3. Konsultatif : outsider mendasarkan atas informasi dengan tidak langsung diperoleh dari masyarakat.
4. Terbagi : masyarakat dan outsider berinteraksi sejauh mungkin secara bersamaan.
5. Pengendalian penuh : masyarakat mendominasi dan outsider membantu ketika diperlukan.

Penilaian masyarakat tentang partisipasi dimana masyarakat memegang kendali merupakan tujuan ideal. Kualitas keterlibatan ditunjukkan oleh manfaat kegiatan yang diambil dalam kerangka kegiatan keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pengertian partisipasi yang mengandung makna pengambilalihan sebagian kegiatan. Dapat dikatakan bahwa semakin banyak skala dan jumlah kegiatan yang diambil alih, semakin tinggi partisipasi masyarakat. Dalam lingkung wilayah, semakin banyak individu berpartisipasi, maka semakin tinggi pula partisipasi dalam wilayah tersebut.

Dalam hubungannya dengan pembangunan, khususnya pembangunan di kelurahan, hal ini berarti keterlibatan mental, emosional, energi seseorang yang mendorong mereka untuk menyumbangkan daya pikir, perasaan dan lainnya bagi tercapainya tujuan secara bersama-sama dengan penuh tanggungjawab terhadap kelurahan dimana mereka tinggal. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dapat dilihat dalam hal sejauh mana partisipasi,

prakarsa dan swadaya masyarakat yang bersangkutan telah berhasil dipeni laian masyarakat tentangkan dan dibina, disamping hal-hal fisik dari padanya yang diharapkan.

Pada bagian ini akan dibahas mengenai beberapa konsep tingkat partisipasi dari teori dan pengalaman dalam bidang perencanaan partisipatif, yang terdiri dari :

1. Tangga Partisipasi Arnstein (1969)

Menurut Arnstein dalam Panudju (1999:69-76) penilaian masyarakat tentang partisipasi atau peran serta masyarakat atau derajat keterlibatan masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah digolongkan menjadi delapan tipologi penilaian masyarakat tentang. Secara garis besar tipologi penilaian masyarakat tentang partisipasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manipulasi

Penilaian masyarakat tentang partisipasi ini adalah yang paling rendah dimana masyarakat hanya dipakai namanya sebagai anggota dalam berbagai badan penasihat advising board. Dalam hal ini tidak ada peran serta masyarakat yang sebenarnya dan tulus, tetapi diselewengkan dan dipakai sebagai alat publikasi dari pihak penguasa.

b. Penyembuhan

Dengan berkedok melibatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, para perancang memperlakukan anggota masyarakat seperti proses penyembuhan pasien dalam terapi. Meskipun masyarakat terlibat dalam banyak kegiatan, pada kenyataannya kegiatan tersebut lebih banyak untuk mengubah pola pikir masyarakat yang bersangkutan daripada mendapatkan masukan dari mereka.

c. Pemberian Informasi

Memberi informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggung jawab dan berbagai pilihan, dapat menjadi langkah pertama yang sangat penting dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian yang sering terjadi penekanannya lebih pada pemberian informasi satu arah dari pihak pemegang kuasa kepada masyarakat. Tanpa adanya

kemungkinan untuk memberikan umpan balik atau kekuatan untuk negoisasi dari masyarakat. Dalam situasi saat itu terutama informasi diberikan pada akhir perencanaan, masyarakat hanya memiliki sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana.

d. Konsultasi

Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada mereka, dapat merupakan langkah penting dalam menuju partisipasi penuh dari masyarakat. Akan tetapi cara ini penilaian masyarakat tentang keberhasilannya rendah karena tidak adanya jaminan bahwa kepedulian dan ide masyarakat akan diperhatikan. Metode yang sering dipergunakan adalah survey tentang arah pikir masyrakat, pertemuan lingkungan masyarakat dan dengar-pendapat dengan masyarakat.

e. Perujukan

Pada penilaian masyarakat tentang ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh meskipun beberapa hal masih tetap ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Dalam pelaksanaannya beberapa anggota masyarakat yang dianggap mampu dimasukkan sebagai anggota dalam badan-badan kerjasama pengembangan kelompok masyarakat yang anggota-anggota lainnya wakil-wakil dari berbagai instansi pemerintah. Walaupun usul dari masyarakat diperhatikan namun suara masyarakat itu sering tidak didengar karena kedudukannya relatif rendah atau jumlah mereka terlalu sedikit dibanding anggota dari instansi pemerintah.

f. Kemitraan

Pada penilaian masyarakat tentang ini, atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi.

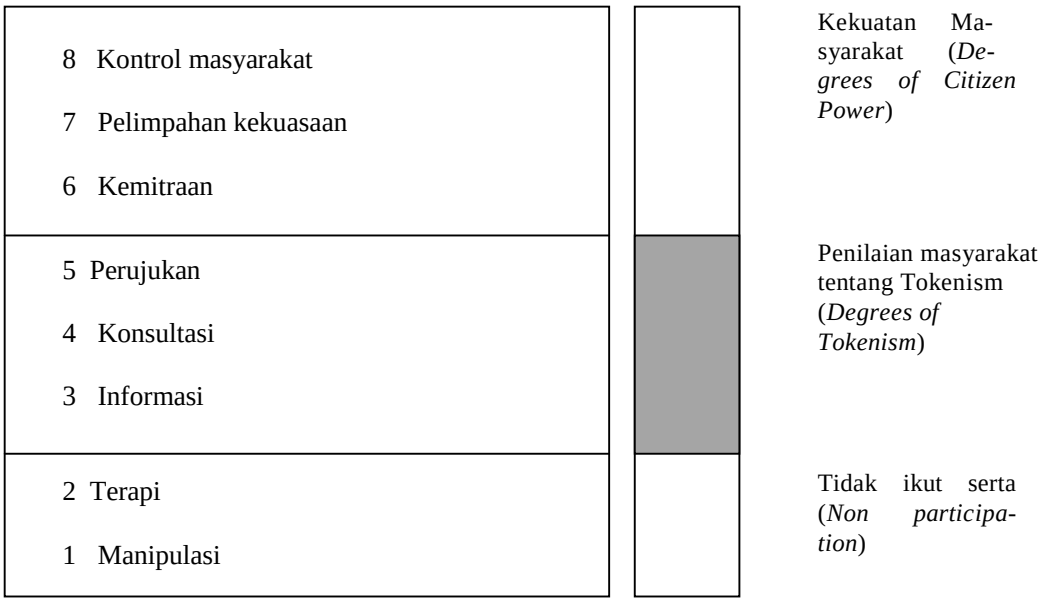
g. Pelimpahan kekuasaan

Pada penilaian masyarakat tentang ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan yang dalam

hal ini adalah pemerintah harus mengadakan tawar menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas.

h. Masyarakat yang mengontrol

Pada penilaian masyarakat tentang ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman dana, tanpa melewati pihak ketiga.



Gambar 2.1
Tipologi Penilaian Masyarakat Tentang Partisipasi Masyarakat Dari Arnstein

Dari kedelapan tipologi tersebut, menurut Arnstein secara umum dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu sebagai berikut:

a. Tidak ada peran serta atau non participation yang meliputi manipulation dan *therapy*;
b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk tinggal menerima beberapa ketentuan atau *degrees of tokenism* yang meliputi *informing, consultation dan placation*;

c. Partisipasi masyarakat dalam bentuk mempunyai kekuasaan atau *degrees of citizen power yang meliputi partnership, delegated power dan citizen control.*

2. Konsep Tingkat Partisipasi IPGI

IPGI (*Indonesian Partnership on Local Governance Initiative*) telah merumuskan sebuah modul yang berjudul "Merumuskan Rencana Tata Ruang Kota secara Partisipatif" pada tahun 2002. Modul ini berisi panduan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan pembangunan secara partisipatif. Modul ini juga berisi tentang penstrukturan tingkat partisipasi masyarakat dari level yang tertinggi hingga level yang terendah. Tahapan tersebut adalah :

- Tahap 1 : Warga sebagai pengawas

  Tahapan ini menurut IPGI merupakan level tertinggi dalam partisipasi. Hal-hal yang menonjol pada tahapan ini adalah pemecahan masalah pada isu-isu yang controversial. Sedangkan mekanisme yang dapat digunakan adalah referendum pada tingkat local.
- Tahap 2 : Pembuatan Rencana Bersama

  Tahapan ini berarti terjadi kegiatan untuk memperluas keterlibatan warga dalam merencanakan pemecahan masalah atau isu yang kompleks. Mekanisme yang dapat digunakan anatara lain adalah kelompok pendukung, negosiasi dan mediasi
- Tahap 3 : Konsultasi

  Untuk tahap ini hal utama yang menjadi inti dari kegiatan adalah terjadinya pembicaraan atau dialog antara perencana dan warga masyarakat untuk memberikan masukan dan mengidentifikasikan masalah. Mekanisme yang dapat digunakan adalah rapat warga, lokakarya dan *open house*.
- Tahap 4 : Warga sebagai pemberi umpan balik

  Tahapan ini berarti terjadi proses dialogis antara pihak perencana dan masyarakat. Salah satu deskripsi kejadian tersebut adalah perencana yang mempertanyakan pendapat public untuk menambah pemahaman dalam evaluasi isu. Mekanisme yang dapat digunakan adalah jajak pendapat, profil komunitas, mengumpulkan dan menulis respon pada kertas draft.

- Tahap 5 : Warga diberi informasi

  Sebagai bentuk komunikasi antara perencana dengan warga diberi tahu informasi oleh pengambil keputusan tetapi dapat diberi kesempatan untuk terlibat atau memberikan pendapat. Mekanisme yanag dapat digunakan adalah press release, berita dan koran.

3. Konsep Tingkat Partisipasi Sumarto

Pendapat lain diutarakan oleh salah seseorang praktisi lapangan dalam bidang perencanaan partisipatif di Indonesia. Menurut praktisi tersebut, Hetifah Sj. Sumarto (2004:67), melihat dari pengalaman praktis dari perencanaan partisipatif di beberapa kawasan Indonesia, tingkat partisipasi warga atau *civil society* untuk tataran yang lebih tinggi, dalam ikut mempengaruhi program dan kebijakan public terbagi menjadi tiga, yaitu level tinggi, sedang dan rendah yaitu :

- Rendah
  - Masyarakat hanya menyaksikan kegiatan proyek yang dilakukan pemerintah.
  - Masyarakat memberikan masukan secara langsung atau menuliskan surat dan tulisan surat kabar.
  - Pemerintah hanya memberikan informasi proyek kepada masyarakat dan meminta tanggapan sebagai konfirmasi.
  - Ketergantungan kelompok-kelompok *civil society* kepada dana dari pihak lain, sehingga apabila dana berhenti maka kegiatan secara stimulan akan terhenti juga.
- Sedang
  - Masyarakat sudah berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, meskipun masih ada pihak yang dominan.
  - Dialog antar komponen *civil society* terbentuk, tetapi belum menyentuh masalah yang riil.
  - Masyarakat dapat menyuarakan kepentingannya tetapi hanya sebatas masalah praktis dan keseharian.
  - Dialog partisipatif dilakukan melalui radio komunitas, tetapi masih bergantung pihak tertentu.

- Komponen *civil society* berpartisipasi aktif, tetapi bagi kelompok masyarakat dipertanyakan tingkat respresentasinya.
- Masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam penyusunan rencana pembangunan, meskipun masyarakat terbatas dalam hal tingkat partisipasinya.

▪ Tinggi
- Masyarakat benar-benar mandiri mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga hasil pembangunan, termasuk juga dalam masalah pendanaaan
- Masyarakat tidak hanya ikut merumuskan program, tetapi juga ikut menentukan program-program yang akan dieksekusi.
- Kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam program semakin luas dan kompleks.
- Masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan hingga ke masalah rencana pembangunan yang sudah disepakati.
- Proses konsultasi kepada masyarakat semakin diperluas dan menyentuh keseluruhan aspek.
- Masyarakat yang termajinalkan dapat diikutsertakan dalam perencanaan, penyusunan rekomendasi kinerja, maupun penetapan kegiatan.

Berbeda dengan pendapat terdahulu yang telah dijelaskan, maka secara tegas Bintoro (1989:207) mengungkapkan bahwa keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti keterlibatan dalam proses menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah serta keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan juga keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

Sedangkan Cohen dan Up Hoff dalam Syamsi (1986:114) menjelaskan bahwa “Partisipasi itu merupakan keterlibatan nyata orang-orang dalam proses pembuatan keputusan mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Juga dapat diartikan sebagai keterlibatan mere ka dalam menikmati hasil serta partisipasi dalam mengadakan evaluasi”. Dengan demikian melalui

partisipasi masyarakat benar-benar dilibatkan secara totalitas sejak awal sampai akhir pelaksanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat sebagai partisipasi vertical dan horizontal. Partisipasi vertikal terjadi dalam kondisi tertentu dimana masy arakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan mana masyarakat berbeda dalam posisi bawahan pengikut atau klien. Partisipasi horizontal terjadi karena pada suatu saat tidak mustahil masyarakat mempunyai kemampuan untuk berprakarsa dimana setiap anggota kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu sama lain dalam usaha bersama, maupun dalam rangka kegiatan dengan pihak lain.

Dari penegasan tersebut memberikan gambaran bahwa dampak partisipasi yang ditumbuhkan dari atas, masyarakat cenderung lebih bersifat pasif, dan jika partisipasi itu bersifat horizontal, maka akan menumbuhkan sifat aktif dan mandiri.

Dari beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa masyarakat sebagai subjek atau pelaku pembangunan, sekaligus juga sebagai objek atau sasaran dari pembangunan, bukan saja mereka memberi tetapi juga sebagai pelaksana, penerima hasil dan mereka juga memelihara hasil-hasil pembangunan. Untuk itu keterlibatan warga masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan, sehingga dapat bersama-sama untuk melaksanakan pembangunan.

Namundemikian, persoalan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan seringkali berlangsung tidak efektif. Cukup banyak kendala yang timbul yang seringkali tidak mampu diantisipasi. Soelaiman (1985:15-20) menyebutkan beberapa hambatan atau kendala yang sebenarnya apabila didayagunakan dengan baik akan menjadi faktor pendukung keberhasilan partisipasi, yaitu sebagai berikut:

(1) Sikap sosial yang membudaya seperti paternalistik, feodal, superioritas/dominasi, yang memandang pegawai pemerintah bukan sebagai abdi negara tapi sebagai penguasa/raja.
(2) Struktur dan pranata sosial yang berlapis-lapis cenderung mementingkan kesadaran akan kelasnya saja, tetapi kurang menghargai kelas atau kelompok lain.

(3) Adanya sikap ketergantungan dan pasrah kepada nasib sebelum berusaha keras.
(4) Kekecewaan yang mendalam pada masyarakat akibat adanya kesenjangan.
(5) Kemiskinan atau penghasilan rendah, sehingga waktu dan tenaga tercurah habis untuk mencari nafkah.
(6) Mobilisasi penduduk yang tinggi, terutama adanya urbanisa si.
(7) Program-program yang tidak berorientasi pada kebutuhan lokal.

Berdasarkan pendapat tersebut, sebenarnya persoalan pelaksanaan partisipasi masyarakat dapat dipenilaian masyarakat tentangkan, manakala pimpinan organisasi beserta pengurusnya mampu membatasi atau me ngurangi dan bahkan meniadakan hambatan-hambatan yang telah disebutkan diatas. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya-upaya penggerakan di segala aspek/bidang, baik itu keorganisasian, personil, anggaran, dan sumber-sumber serta bidang materiilnya (sarana prasarana penunjang), sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Sedangkan menurut Midgley (1986:113-117) menyimpulkan terdapat empat pelaku yang mempengaruhi keberhasilan partisipasi masyarakat, yakni: pemerintah, pelaksana, fasilitator dan masyarakat itu sendiri.

Secara umum partisipasi seseorang, sekelompok orang atau masyarakat mengandung maksud penyerahan sebagian peran dalam kegiatan dan tanggung jawab tertentu dari satu pihak kepihak yang lain (Ramos dalam Yeung dan McGee, 1986: 32). Jadi partisipasi memerlukan kesedian kedua belah pihak dalam suatu hubungan yang saling menguntungkan.

Keinginan masyarakat untuk berpartisipasi sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam berpartisipasi:

a. Hasil dari keterlibatan, artinya dalam berpartisipasi seseorang tidak akan antusias dalam perencanaan ataupun pelaksanaan kegiatan jika dia merasa bahwa partisipasi tidak mempunyai akibat bermakna pada hasil a khirnya.
b. Adanya kepentingan khusus yang berpengaruh secara langsung. Masyarakat akan bersedia berpartisipasi jika individu tersebut merasa terkait (terlibat) dan mendapatkan keuntungan baik sebagai individu maupun kelompok dimana ia menjadi anggotanya sesuai keinginan dan kebutuhan mereka yang dapat dirasakan manfaatnya.

Keinginan masyarakat sebelum terlibat dalam proses partisipasi menurut Dusseldorp (1981:18) yaitu masyarakat sadar bahwa:

a. Situasi sekarang ini tidak memuaskan dan dapat atau harus diperbaiki.
b. Situasi sekarang dapat diubah dan diperbaiki melalui kegiatan manusia.
c. Masyarakat merasa dapat dan harus berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
d. Masyarakat dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat, dan ada rasa percaya diri.

Pada dasarnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat tergantung pada kemauan individu yang meliputi tiga hal (PY. Chinchankar,1984:44), yaitu:

a) Mau membantu keuangan dari sumber sendiri, dalam bentuk tunai atau barang,
b) Mau berbagi resiko dan tanggung jawab,
c) Mau mengelola kekuatan dari sumber-sumber yang ada dengan persetujuan bersama.

Keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan kaitannya dengan partisipasi, menurut Dusseldorp (1981:24) terdapat dua bentuk partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan, yakni: a) Partisipasi bebas dan b) Partisipasi terpaksa. Partisipasi bebas terjadi bila seseorang individu melibatkan dirinya secara sukarela didalam suatu kegiatan partisipasi tertentu. Partisipasi bebas dapat dibagi menjadi dua katagori yaitu partisipasi spontan dan partisipasi terbujuk. Partisipasi spontan terjadi bila seseorang individu mulai berpartisipasi berdasarkan pada keyakinan tanpa dipengaruhi melalui penyuluhan atau ajakan oleh lembaga-lembaga atau orang lain.

Sedangkan partisipasi terbujuk adalah jika seseorang individu mulai berpartisipasi setelah diyakinkan melalui penyuluhan atau oleh pengaruh lain sehingga berpartisipasi secara sukarela didalam aktivitas kelompok tertentu. Adapun partisipasi terpaksa dapat terjadi dalam berbagai cara, yaitu partisipasi terpaksa oleh hukum dan terpaksa keadaan sosial ekonomi. Partisipasi terpaksa oleh hukum terjadi bila orang-orang dipaksa melalui peraturan atau hukum, berpartisipasi didalam kegiatan-kegiatan tertentu tetapi bertentangan dengan keyakinan mereka dengan derajat pemaksaan yang berbeda-beda, misalnya anggota masyarakat wajib memelihara fasilitas sosial dan utilitas umum, hal ini

tertuang didalam peraturan/instruksi menteri dalam negeri. Partisipasi ter paksa karena kondisi ekonomi terjadi bila seseorang yang tidak turut di dalam suatu kegiatan akan mendapatkan kesulitan dalam aspek sosial ek onomi, misalnya bila seseorang tidak turut serta dalam pemeliharaan prasarana lingkungan di kampungnya maka ia akan disisihkan dari pergaulan tetangganya.

Jadi secara garis besar untuk mencapai tujuan yang melibatkan partisipasi masyarakat mencakup pengetahuan, sikap dan tindakan dari masyarakat itu sendiri.

Partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Karena partisipasi merupakan kerjasama maka dalam definisi ini tidak diasumsikan bahwa subsistem disubordinasikan oleh suprasistem dan subsistem adalah sesuatu yang pasif dari suatu sistem pembangunan. Subsistem dalam konteks partisipasi ini diasumsikan mempunyai aspirasi, nilai budaya yang perlu diakomodasikan dalam proses perencanaan dan pelaksa naan suatu program pembangunan. Definisi inilah yang berlaku secara univer sal tentang partisipasi (Soetrisno, 2004: 207).

Munculnya paradigma pembangunan partisipatoris mengindikasikan adanya dua perspektif: yang pertama, pelibatan masyarakat setempat dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan program atau proy ek yang akan mewarnai hidup mereka, sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi setempat, pola sikap dan pola berpikir sertanilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh. Yang ke dua adalah membuat umpan balik yang pada hakikatnya merupakan bagian tak terlepaskan dari kegiatan pembangunan.

Sejalan dengan hal itu, J. Pretty dan Guijt (1992) dalam Britha Mikkelsen (2001) menjelaskan tentang implikasi praktis dari pendekatan partisipatoris , yaitu Pendekatan pembangunan partisip atoris harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri . Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri.

Ini memerlukan perombakan dalam seluruh praktik dan pemikiran, disamping bantuan pembangunan. Ringkasnya, diperlukan suatu paradigma baru.

Perubahan paradigma nampaknya lebih diakibatkan oleh pekerjaan pembangunan dibandingkan oleh penelitian pe mbangunan. Luasnya kekecewaan atas hasil-hasil yang kurang memuaskan, sekalipun sudah dilakukan upaya yang sungguh-sungguh, telah menyebabkan timbulnya perhatian baru terhadap pembangunan partisipatoris.

Dengan demikian maka pengertian peran serta masyarakat dalam bidang buangan sampah adalah keterlibatan masyarakat dalam arti turut serta bertanggungjawab baik pasif maupun aktif individu, keluarga dan kelompok untuk mewujudkan kesehatan bagi diri sendiri maupun lingkungan.

2.2 Persepsi dan Preferensi

1. Persepsi

Persepsi, menurut Rakhmat Jalaludin (1998:51), adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafslrkan pesan.

Menurut Ruch (1967:300), persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk inderawi (sensory) dan pengalaman masa lampau yang relevan diorgani-sasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang ters truktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Senada dengan hal tersebut Atkinson dan Hilgard (1991:201) mengemukakan bahwa persepsi adalah proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan pola stimulus dalam lingkungan. Gibson dan Donely (1994:53) menjelaskan bahwa persepsi adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seorang individu.

Dikarenakan persepsi bertautan dengan cara mendapatkan penge tahuan khusus tentang kejadian pada saat tertentu, maka persepsi terjadi kapan saja stimulus menggerakkan indera. Dalam hal ini persepsi diartikan sebagai proses mengetahui atau mengenali obyek dan kej adian obyektif dengan bantuan indera (Chaplin, 1989: 358)

Sebagai cara pandang, persepsi timbul karena adanya respon terhadap stimulus. Stimulus yang diterima seseorang sangat komplek, stimulus masuk ke

dalam otak, kernudian diartikan, ditafsirkan serta diberi makna melalui proses yang rumit baru kemudian dihasilkan persepsi (Atkinson dan Hilgard, 1991 : 209).

Dalam hal ini, persepsi mencakup penerimaan stimulus (inputs), pengorganisasian stimulus dan penerjemahan atau penafsiran stimulus yang telah diorganisasi dengan cara yang dapat mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sehingga orang dapat cenderung menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan keadaannya sendiri (Gibson, 1986: 54).

Proses pembentukan persepsi dijelaskan oleh Feigi (dalam Yusuf, 1991: 108) sebagai pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimuli. Setelah mendapat stimuli, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan "interpretation", begitu juga berinteraksi dengan "closure". Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang mana pesan yang dianggap pentin dan tidak penting. Proses closure terjadi ketika hasil seleksi tersebut akan disusun menjadi satu kesatuan yang berurutan dan bermakna, sedangkan interpretasi berlangsung ketika yang bersangkutan memberi tafsiran atau makna terhadap informasi tersebut secara menyeluruh. Menurut Asngari (1984:12-13) pada fase interpretasi ini, pengalaman masa silam atau dahulu. memegang peranan yang penting.

Faktor-faktor fungsional yang menentukan persepsi seseorang berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain termasuk yang kita sebut sebagai faktor-faktor personal (Rakhmat 1998:55). Selanjutnya Rakhmat menjelaskan yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimuli, tetapi karakteristik orang yang memberi respon terhadap stimuli.

Persepsi meliputi juga kognisi (pengetahuan), yang mencakup penafsiran objek, tanda dan orang dari sudut pengalaman yang bersangkutan (Gibson, 1986 :54). Selaras dengan pernyataan tersebut Krech, dkk. (dalam Sri Tjahjorini Sugiharto 2001:19) mengemukakan bahwa persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama, yakni pengalaman masa lalu dan faktor pribadi.

2. Preferensi

Preferensi partisipasi masyarakat dalam memeliharan dan memberperbaiki saluran drainase adalah keinginan atau kecenderungan masyarakat untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi di suatu tempat tinggal yang dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Prefensi masyarakat dalam memilih kriteria dalam pemeliharaan dan perbaikan saluran drainaes sangat bervariasi, karena setiap individu mempunyai keinginan berbeda-beda dalam memilih kriteria. Namun secara umum, tingkat prefensi masyarakat tersebut dapat diperoleh berdasarkan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan pemilihan suatu kriteia dalam berpartisipasi untuk pemeliharaan dan perbaikan saluran drainase penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prefensi masyarakat (masyarakat yang bertempat tinggal di Perumahan Pondok Ungu Permai) di kota Bekasi, dalam memilih dan menentukan kriteria dalam berpartisipasi. Serta mencari kriteria-kriteria apa saja yang dominan mempengaruhi preferensi tersebut.

Preferensi mengandung pengertian kecenderungan dalam memilih atau prioritas yang diinginkan. Jadi dalam studi ini ingin mengetahui kecenderungan/prioritas berpartisipasi yang diinginkan dari masyarakat Perumahan Pondok Ungu Permai terhadap keberadaan saluran drainase di tempat tinggal mereka yang fungsinya sekarang ini tidak mendapat perhatian dari masyarakat sekitar.

2.3 Drainase

Drainase berasal dari kata *to drain* yang berarti mengeringkan atau mengalirkan air. Drainase merupakan suatu sistem pembuangan air bersih dan air limbah dari daerah pemukiman, industri, pertanian, badan jalan dan permukaan perkerasan lainnya, serta berupa penyaluran kelebihan air pada umumn ya, baik berupa air hujan, air limbah maupun air kotor lainnya yang keluar dari kawasan yang bersangkutan baik di atas maupun di bawah permukaan tanah ke badan air atau ke bangunan resapan buatan (Suripin, 2003). Pemahaman secara umum mengenai drainase perkotaan adalah suatu ilmu dari drainase yang mengkhususkan pengkajian pada kawasan perkotaan, yaitu merupakan suatu

sistem pengeringan dan pengaliran air dari wilayah perkotaan yang meliputi pemukiman, kawasan industri dan perdagangan, sekolah, rumah sakit, lapangan olahraga, lapangan parkir, instalasi militer, instalasi listrik dan telekomunikasi, pelabuhan udara, pelabuhan laut, serta tempat-tempat lainnya yang merupakan bagian dari sarana kota yang berfungsi mengendalikan kelebihan air permukaan, sehingga menimbulkan dampak negatif dan dapat memberikan manfaat bagi kegiatan kehidupan manusia (Hasmar, 2002).

2.3.1 Fungsi Drainase

Drainase perkotaan berfungsi untuk mengalirkan air lebih dari satu kawasan yang berasal dari air hujan maupun air buangan, agar tidak terjadi genangan yang berlebihan pada suatu kawasan tertentu. Karena suatu kota terbagi-bagi menjadi beberapa kawasan, maka drainase di masing-masing kawasan merupakan komponen yang saling terkait dalam suatu jaringan drainase perkotaan dan membentuk satu sistem drainase perkotaan.

2.3.2 Manfaat Drainase

Dengan adanya suatu sistem drainase di perkotaan maka akan diperoleh banyak manfaat pada kawasan. Manfaat drainase yang dimaksud adalah akan semakin meningkatnya kesehatan, kenyamanan dan keasrian da erah pemukiman khususnya dan daerah perkotaan pada umumnya, dan dengan tidak adanya genangan air, banjir dan pembuangan limbah yang tidak teratur, maka kualitas hidup penduduk di wilayah bersangkutan akan menjadi lebih baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketentraman seluruh masyarakat.

2.3.3 Jenis Drainase

Jenis drainase terbagi atas empat macam, yaitu sebagai berikut.

2.3.3.1 Jenis Drainase Menurut Sejarah Terbentuknya

Jenis drainase menurut sejarah terbentuknya ada dua macam, yaitu :

b. Drainase Alamiah

- Terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan-bangunan penunjang;
- Saluran terbentuk oleh gerusan air yang bergerak karena gravitasi, yang lambat laun membentuk jalan air yang permanent seperti sungai.

c. Drainase Buatan
- Dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu;
- Dibentuk berdasarkan analisis ilmu drainase, untuk menentukan debit akibat hujan dan dimensi saluran;
- Memerlukan bangunan-bangunan khusus, seperti selokan, gorong-gorong, pipa-pipa, dsb.

2.3.3.2 Jenis Drainase Menurut Letak Bangunan

Jenis drainase menurut letak bangunan ada dua macam, yaitu :

a. Drainase Permukaan (*Surface Drainage*)
- Berada di atas permukaan tanah;
- Berfungsi mengalirkan air lintasan permukaan;
- Analisis aliran : analisis *open chanel flow*.

b. Drainase Bawah Permukaan Tanah (*Subsurface Drainage*)
- Untuk mengalirkan air lintasan permukaan melalui media di bawah permukaan tanah (pipa-pipa);
- Alasan menggunakan saluran ini :
  - Tuntutan artistik;
  - Tuntutan fungsi permukaan tanah yang tidak membolehkan adanya saluran di permukan tanah.

2.3.3.3 Jenis Drainase Menurut Fungsi

Jenis drainase menurut fungsinya ada dua macam, yaitu :

a. Satu Jenis Buangan
- Fungsi : mengalirkan satu jenis buangan, seperti :
  - Air hujan;
  - Limbah domestik;

- Limbah industri.

b. Beberapa Jenis Buangan
   - Fungsi : mengalirkan beberapa jenis air buangan
     - Bercampur;
     - Bergantian.

2.3.3.4 Jenis Drainase Menurut Konstruksi

Jenis drainase menurut Konstruksi ada dua macam, yaitu :

a. Saluran Terbuka
   - Untuk Drainase Air Hujan;
   - Untuk Drainase air non-hujan yang tidak berbahaya.

b. Saluran Tertutup
   - Untuk air kotor;
   - Untuk saluran di tengah kota.

2.3.4 Pola Jaringan Drainase

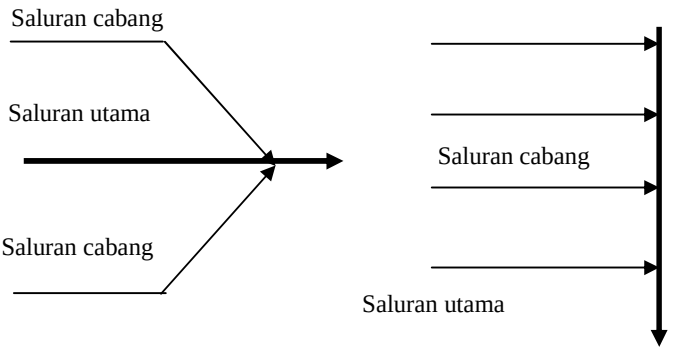
Pola jaringan drainase terdiri dari pola pada daerah distribusi drainase perkotaan dan daerah aliran sungai.

2.3.4.1 Daerah Distribusi Drainase Perkotaan

Daerah distribusi drainase perkotaan terbagi atas enam macam, yaitu :

A. Paralel

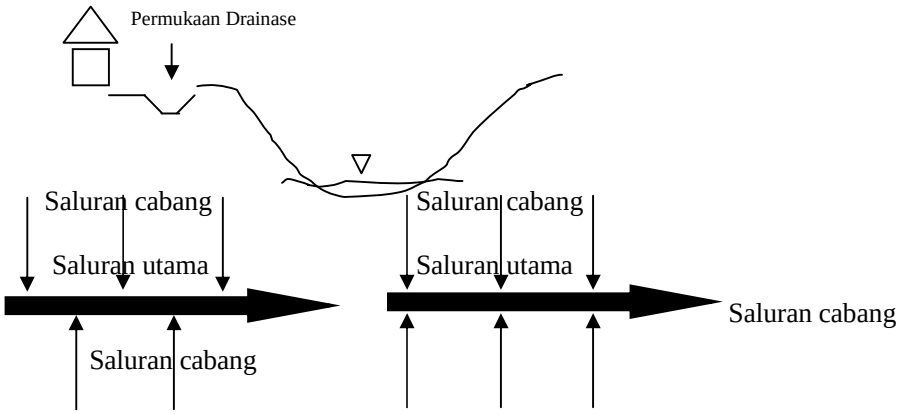
Saluran utama terletak sejajar dengan saluran cabang. Dengan saluran cabang (sekunder) yang cukup banyak dan pendek-pendek, apabila terjadi perkembangan kota, saluran-saluran akan dapat menyesuaikan diri. Saluran ini biasa dijumpai pada daerah dengan topografi yang cenderung datar dan terletak jauh dari sungai dan danau.



Gambar 2.2 Pola Paralel

B. Siku

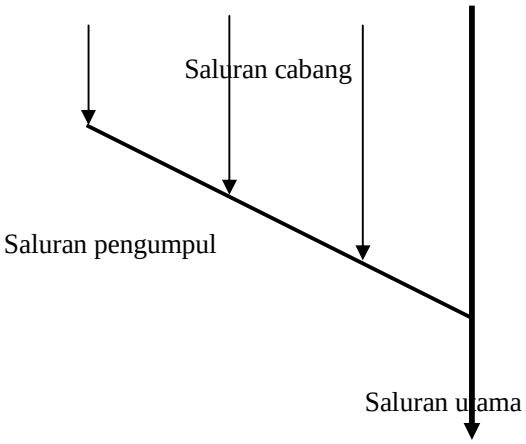
Pola ini dibuat pada daerah yang mempunyai topografi sedikit lebih tinggi dari pada sungai. Sungai sebagai saluran pembuang akhir berada di tengah kota.



Gambar 2.3 Pola Siku

C. Grid Iron

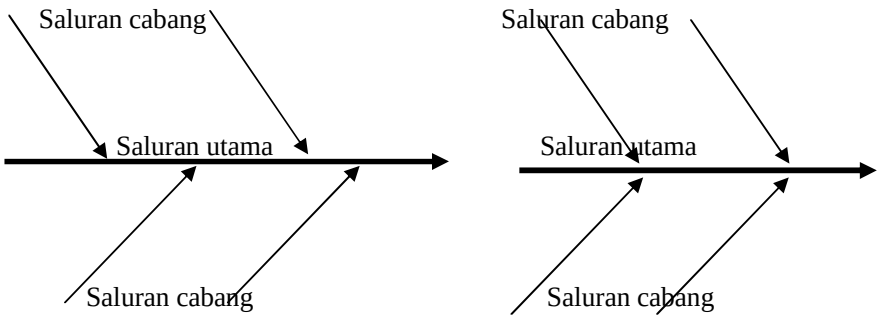
Pola jaringan ini terjadi pada daerah dimana sungai terletak di pinggir kota, saluran-saluran cabang dikumpulkan terlebih dahulu pada saluran pengumpul.



Gambar 2.4 Pola Grid Iron

D. Pola Alamiah

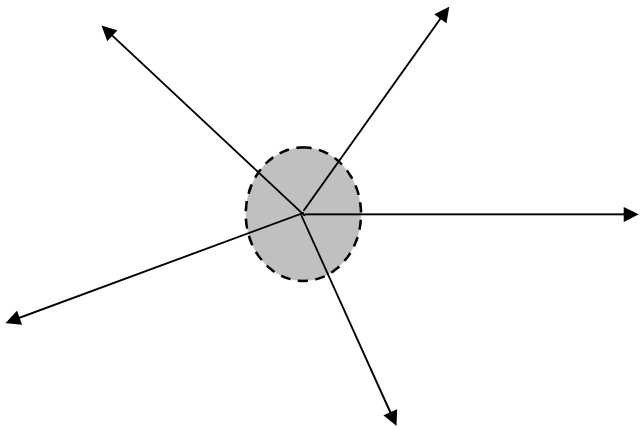
Pola jaringan alamiah sama seperti pola siku, hanya beban sungai pada pola alamiah lebih besar.



Gambar 2.5 Pola Alamiah

E. Radial

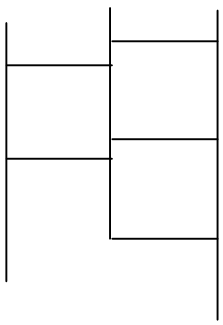
Pola jaringan radial terjadi pada daerah berbukit, sehingga pola aliran memencar ke segala arah.



Gambar 2.6 Pola Radial

F. Jaring-Jaring

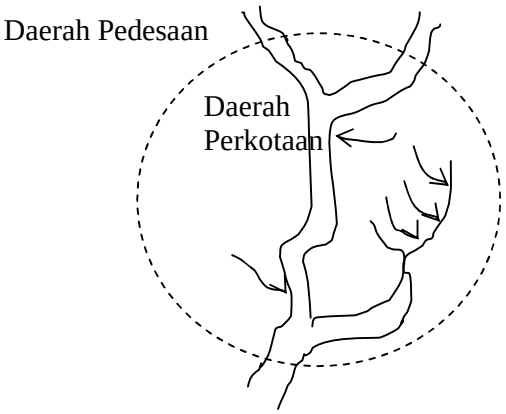
Pola ini mempunyai saluran-saluran pembuang yang mengikuti arah jalan raya, dan cocok untuk daerah dengan topografi datar.



Gambar 2.7 Pola Jaring-jaring

2.3.4.2 Daerah Aliran Sungai (DAS)

Jaringan drainase perkotaan meliputi seluruh alur air, baik alur alam maupun alur buatan yang hulunya terletak di kota dan bermuara di sungai yang melewati kota tersebut, atau bermuara ke laut tepi k ota tersebut.



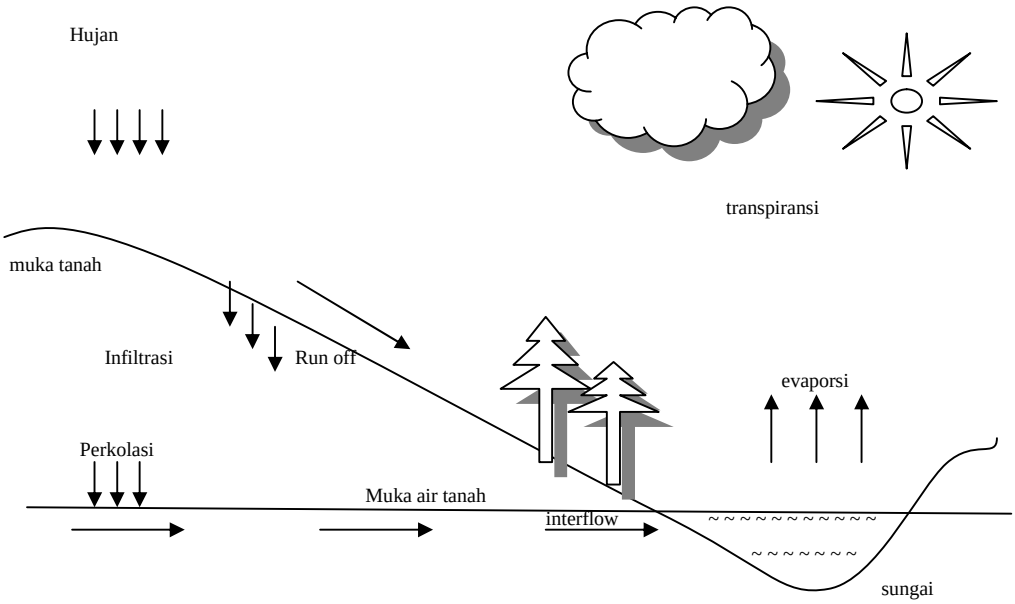
Legenda :

Batas kota
Sungai (bagian dari sistem pengendalian banjir)
Jaringan drainase

Gambar 2.8 Pola Daerah Aliran Sungai

2.3.5 Siklus Hidrologi

Siklus hidrologi adalah proses yang diawali oleh *evaporas*/penguapan kemudian terjadinya kondensasi dari awan hasil *evaporasi*. Awan terus terproses, sehingga terjadi hujan yang jatuh ke permukaan tanah. Pada muka tanah air hujan ada yang mengalir di permukaan tanah, sebagai air *run off* dan sebagian *infiltrasi*/meresap ke dalam lapisan tanah. Besarnya *run off* dan infiltrasi tergantung pada parameter tanah atau jenis tanah. Air *run off* mengalir ke permukaan air di laut, danau, sungai. Air *infiltrasi*/meresap ke dalam lapisan tanah, menambah tinggi muka air tanah, kemudian juga merembes di dalam tanah ke arah muka air terendah, akhirnya juga kemungkinan sampai ke laut, danau, sungai. Kemudian terjadi lagi proses penguapan.



Gambar 2.9 Siklus Hidrologi

2.3.6 Klasifikasi Drainase

Berdasarkan status pengalirannya, drainase perkotaan dapat dirinci sebagai berikut:

- Drainase Primer, adalah drainase utama yang berfungsi sebagai daerah tumpahan air dari drainase sekunder dan drainase tersier sebelum ke laut. Drainase juga merupakan aliran-aliran sungai utama yang ada di perkotaan.
- Drainase Sekunder, adalah wadah pengaliran dari drainase tersier sebelum ke drainase primer. Drainase sekunder tersebut dapat berupa anak-anak sungai dari drainase primer.
- Drainase Tersier, adalah drainase yang merupakan wadah yang umumnya merupakan saluran pembuangan limbah rumah tangga yang berada di lingkungan permukiman maupun perkotaan.

2.3.7 Klasifikasi Tingkat Kerusakan

Kerusakan saluran secara fisik dikategorikan sebagai berikut:

1. Kerusakan ringan, yaitu kerusakan saluran yang dapat diperbaiki saat itu dan tidak memerlukan waktu yang lama;

2. Kerusakan sedang, yaitu kerusakan saluran yang dapat diperbaiki saat itu, namun memerlukan material dan waktu yang lama dari kerusakan ringan;
3. Kerusakan berat, yaitu kerusakan saluran yang diakibatkan oleh kecelakaan kendaraan atau bencana alam sehingga dalam perbaikannya memerlukan penanganan khusus dengan waktu perbaikan yang relatif lama.

- **Saluran inlet/gutter inlet**

  Saluran pembawa yang mengalirkan air yang berasal dari perkerasan jalan menuju saluran drainase

Tabel II.1
Saluran Samping dan Saluran Inlet (Terbuka/Tertutup)

Jenis Konstruksi	Kerusakan Ringan dan Sedang	Kerusakan Berat
	Penyebab	Penyebab
Tanah	• Endapan lumpur • Timbunan sampah • Rumput liar • Longsoran talud • Kemiringan memanjang saluran agak datar, sehingga air tidak mengalir dengan lancar, mempercepat sedimentasi.	• Tanah ekspansif • Beban lalulintas pada jalan yang bahunya kurang lebar atau akibat kendaraan yang parkir di bahu jalan • Bencana alam • Kecelakaan kendaraan
Pasangan batu kali dan bata merah	• Aliran air membawa banyak material endapan. • Saluran tertimbun longsoran dari talud tepi jalan.	• Tanah ekspansif • Beban lalulintas pada jalan yang bahunya kurang lebar atau akibat kendaraan yang parkir di bahu jalan • Bencana alam
Beton bertulang/ tidak bertulang	• Aliran air membawa banyak material endapan. • Saluran tertimbun longsoran dari talud tepi jalan.	• Tanah ekspansif • Turbulensi air deras menyebabkan penggerusan (scouring) pada dasar saluran maupun dinding konstruksi • Beban lalulintas pada jalan yang bahunya kurang lebar Uplift (gaya angkat) dari air tanah menyebabkan kerusakan dasar saluran (retak dan pecah) • Bencana alam • Kecelakaan kendaraan

Sumber : SNI : Pd T-14-2005-B tentang Inspeksi dan Pemeliharaan Drainase Jalan

Untuk lebih jelasnya mengenai tipe kerusakan saluran samping dan saluran inlet dapat dilihat pada gambar 2.10.

Kerusakan Sedang dan Ringan	Kerusakan Berat
 a. Saluran di tutupi timbunan sampah	 b. Talut saluran runtuh
 c. Saluran yangditumbuhi rumput liar	 d. Talut saluran akan runtuh akibat beban berat
 e. Inlet saluran ditutupi timbunan sampah	 f. Inlet saluran tertutup lapisan aspal

Sumber : SNI : Pd T-14-2005-B tentang Inspeksi dan Pemeliharaan Drainase Jalan

Gambar 2.10
Tipe Kerusakan Saluran Samping dan Saluran Inlet

- **Gorong-gorong**

  Bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air (saluran irigasi atau pembuang) melewati bawah jalan air lainnya (biasanya saluran), di bawah jalan, atau jalan kereta api.

Tabel II.2
Gorong-Gorong

Jenis Konstruksi	Kerusakan Ringan dan Sedang	Kerusakan Berat
	Penyebab	**Penyebab**
Pipa besi Berombak	• Karat Endapan • Sampah • Batang • Kayu	• Beban berat • Bencana alam • Kecelakaan kendaraan • Inlet goronggorong tidak dilengkapi dengan bak penampung (catch basin) sehingga air langsung mengalir masuk ke goronggorong dengan benda-benda yang hanyut terbawa air
Beton bertulang/ tidak bertulang	• Endapan • Sampah • Batang kayu	• Beban berat • Bencana alam • Kecelakaan kendaraan • Inlet goronggorong tidak dilengkapi dengan bak penampung (catch basin) sehingga air langsung mengalir masuk ke goronggorong dengan benda-benda yang hanyut terbawa air • Dasar goronggorong tergerus air (scouring) • Sambungan gorong-gorong (joint) kurang sempurna pemasangannya • Konstruksi goronggorongnya sendiri sudah lecet pada awal pemasangannya, sehingga kerusakan semakin mengembang setelah difungsikan.

Sumber : SNI : Pd T-14-2005-B tentang Inspeksi dan Pemeliharaan Drainase Jalan

- **Bak kontrol**

  Bangunan pelengkap drainase yang didesain khusus sebagai tempat bertemunya jaringan pipa yang berasal dari saluran drainase lainnya dan juga berfungsi sebagai tempat untuk menginspeksi/memeriksa kondisi saluran .

Tabel II.3
Bak Kontrol

Jenis Konstruksi	Kerusaka Ringan dan Sedang	Kerusakan Berat
	Penyebab	**Penyebab**
Konstruksi pasangan batu kali dan bata merah	• Endapan lumpur • Timbunan • Sampah • Erosi/gerusan	• Tanah ekspansif • Vibrasi kendaraan berat • Bencana alam • Kecelakaan kendaraan
Konstruksi beton bertulang/tidak bertulang	• Endapan lumpur • Timbunan sampah • Erosi/gerusan	• Tanah ekspansif • Vibrasi kendaraan berat • Bencana alam • Kecelakaan kendaraan

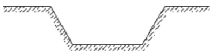
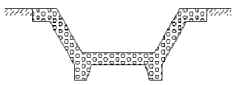
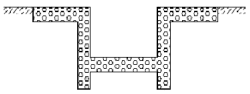
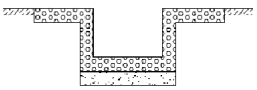
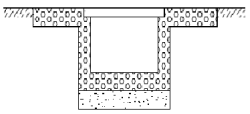
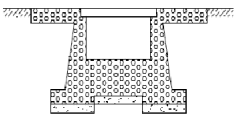
Sumber : SNI : Pd T-14-2005-B tentang Inspeksi dan Pemeliharaan Drainase Jalan

Tabel II.4
Tutup Saluran Samping dan Tutup Bak Kontrol

Jenis Konstruksi	Kerusaka Ringan dan Sedang	Kerusakan Berat
	Penyebab	**Penyebab**
Konstruksi beton bertulang/tidak bertulang	• Beban dari kendaraan yang melintas/parkir melewati tutup • Konstruksinya sendiri sudah lecet pada awal pemasangan, sehingga kerusakan berkembang setelah difungsikan	• Beban berat • Bencana alam • Kecelakaan kendaraan
Konstruksi besi beton, besi siku dan besi kanal	Karat	• Beban berat • Bencana alam • Kecelakaan kendaraa

Sumber : SNI : Pd T-14-2005-B tentang Inspeksi dan Pemeliharaan Drainase Jalan

Tabel II.5
Tipe Penampang Drainase Jalan

No	Tipe Selokan Samping	Potongan Melintang	Bahan Yang Dipakai
1	Bentuk Trapesium		Tanah Asli
2	Bentuk Segitiga		Pasangan batu kali atau tanah asli
3	Bentuk Trapesium		Pasangan batu kali
4	Bentuk Segi empat		Pasangan batu kali
5	Bentuk Segi empat		Beton bertulang pada bagian dasar diberi lapisan pasir ± 10 cm
6	Bentuk segi empat		Beton bertulang pada bagian dasar diberi lapisan pasir ± 10 cm, pada bagian atas ditutup dengan plat beton bertulang
7	Bentuk Segi empat		Pasangan batu kali pada bagian dasar diberi lapisan pasir ± 10 cm, pada bagian atas ditutup dengan plat beton bertulang
8	Bentuk Setengah Lingkaran		Pasangan batu kali atau beton bertulang

Sumber : SNI : Pd T-14-2005-B tentang Inspeksi dan Pemeliharaan Drainase Jalan

2.3.8 Kebijakan Tentang Drainase

Dalam rangka mencapai suatu lingkungan yang baik, asri dan nyaman bagi masyarakat maka diperlukan suatu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan drainase antara lain adalah :

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 Tentang Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
- Peraturan Pemerintah No.14, Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
  Konstruksi, perawatan dan manajemen pelayanan jaringan drainase perkotaan yang lebih dari satu wilayah Tingkat II dipindahkan ke daerah Tingkat I termasuk tugas memberi bimbingan kepada daerah Tingkat II. Konstruksi, perawatan dan manajemen pembuangan sampah serta penyelesaian infrastruktur dipusatkan ke daerah Tingkat II.
- Peraturan Pemerintah No.35, Tahun 1991 tentang Sungai.
  Sungai adalah sumber air yang multi fungsi dan dibawah tanggung jawab Menteri Pekerjaan Umum. Sungai yang terletak melintasi lebih dari satu Daerah Tingkat I diklasifikasikan dalam sungai kelas A. Sungai yang melintasi satu Daerah Tingkat I diklasifikasikan dalam sungai kelas B, kecuali bila sungai sedemikian rupa yang merupakan daya tarik nasional diklasifikasikan dalam sungai kelas A. Pembangunan sungai kelas A seluruhnya didanai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Tingkat I diharapkan mengambil bagian dalam pendanaan operasi dan pemeliharaan.

Pemeliharaan/perbaikan drainase adalah mengembalikan kondisi drainase sesuai dengan desain/perencanaan yang telah dibuat. Pada dasarnya pekerjaan pemeliharaan/perbaikan drainase perkotaan adalah tanggung jawab pemerintah kota. Untuk drainase jalan raya pemeliharaan/perbaikannya merupakan tanggung jawab Dinas Bina Marga, drainase permukiman pemeliharaan dan perbaikannya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota dan masyarakat secara swadaya (Cipta Karya).